



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	9 (<i>sembilan</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 8 Februari 2021
Pukul	:	10.50 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	FAISOL RIZA, SS., Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Dirut PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero). Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero) pada pukul **10.49 WIB** dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 8 Februari 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan dan penjelasan dari PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) terkait rencana strategis dan berperan secara aktif mendukung investasi pemerintah dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak berat oleh pandemi Covid-19.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk melengkapi data lebih detail terkait restrukturisasi pinjaman, pemberian subsidi bunga pinjaman dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), khususnya Jamkrindo dan Askrindo untuk menerapkan pelaksanaan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara transparan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih penerima restrukturisasi pinjaman, pemberian subsidi bunga pinjaman dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit kepada Komisi VI DPR RI.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14:05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**FAISOL RIZA, SS.,
A-33**